



BAWASLU
PROVINSI KEPRI

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

20
24

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanjungpinang, 30 Desember 2024
Kepala Satuan Kerja,



Yessi Yunius, SE, M.Si
Bendahara Utama Muda/IV.c
NIP. 19680321 199703 2 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	1
V. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	57

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Panji Pinang, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Yessi Yunius, SE, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680321 199703 2 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 179,408,136,00.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 169,710,954,620,00 atau mencapai 79 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp216,075,411,000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 41,304,398,674,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 36,683,413,585,00 dan Aset Tetap sebesar Rp 4,620,985,089,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 38,092,334,00 dan Rp 41,266,306,340,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 435,313,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 165,450,260,944,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (165,449,825,631,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 6,520,000,00 dan sebesar Rp 172,452,823,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (165,270,852,808,00).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp42.645.220.914,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 165,270,852,808,00 dikurangi koreksi nilai asset non revaluasi sebesar Rp 9,345,000,00, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 163,882,593,234,00 dan Penurunan Ekuitas sebesar Rp

1,378,914,574,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 41,266,306,340,00.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Audited Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU

TAHUN 2024

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPRI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER 31 DESEMBER DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	179,408,136,00	0	31,371,608,00
JUMLAH PENDAPATAN		0	179,408,136,00	0	31,371,608,00
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2	10,608,017,000,00	9,957,187,878,00	94	6,886,018,279,00
Belanja Barang	B.3	200,917,788,000,00	155,410,678,742,00	77	89,224,041,014,00
Jumlah Belanja Operasi		211,525,805,000,00	165,367,866,620,00	78.08	96.110.059.293,00
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.4	4,549,606,000,00	4,343,088,000,00	95	104,300,000,00
Jumlah Belanja Modal		4,549,606,000,00	4,343,088,000,00	95	104,300,000,00
JUMLAH BELANJA		216,075,411,000,00	169,710,954,620,00	78,4	96,214,359,293,00

II. NERACA

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPRI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	300,000,000,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	35,403,788,152,00	41.086.816.400,00
Belanja Dibayar Dimuka	C.3	1,279,625,433,00	229.202.000,00
Persediaan		0	184.679.000,00
Jumlah Aset Lancar		36,683,413,585,00	41.500.697.400,00
ASET TETAP			
Tanah	C.4	22,642,899,00	22.642.899,00
Peralatan dan Mesin	C.5	13,977,141,173,00	10.180.236.287,00
Gedung dan Bangunan	C.6	161,218,481,00	161.218.481,00
Akumulasi Penyusutan	C.7	(9,540,017,464,00)	(9.060.689.481,00)
Jumlah Aset Tetap		4,620,985,089,00	1.303.408.186,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.8	77.200.000,00	77.200.000,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.9	(77.200.000,00)	(77.200.000,00)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		41,304,398,674,00	42.804.105.586,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	38,092,334,00	158.884.672,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.11	0,00	0,00
Hibah yang Belum Disahkan		0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		38,092,334,00	158.884.672,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	41,266,306,340,00	42.645.220.914,00
JUMLAH EKUITAS		41,266,306,340,00	42.645.220.914,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		41,304,398,674,00	42.804.105.586,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPRI LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	435,313,00	0
JUMLAH PENDAPATAN		435,313,00	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	9,976,010,895,00	6,885,595,519,00
Beban Persediaan	D.3	205,215,000,00	20,536,000,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	72,255,044,259,00	54,752,671,847,00
Beban Pemeliharaan	D.5	1,396,832,047,00	1,209,821,173,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	80,544,320,316,00	33,007,705,444,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1,072,838,427,00	1,245,680,720,00
JUMLAH BEBAN		165,450,260,944,00	97,122,010,703,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(165,449,825,631,00)	(97,122,010,703,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	6,520,000,00	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	13,253,280,00
Jumlah Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		6,520,000,00	13,253,280,00
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Jumlah Surplus (defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0

URAIAN	Ref	20234	2023
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		172,452,823,00	59,641,058,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		172,452,823,00	59,641,058,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		178,972,823,00	59,641,058,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(165,270,852,808,00)	(97,070,994,375,00)
POS LUAR BIASA	D.9	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(165,270,852,808,00)	(97,070,994,375,00)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPRI
LAPORAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	42,645,220,914,00	2.389.268.305,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(165,270,852,808,00)	(97,070,994,375,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset			
Koreksi Nilai Persediaan			
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.1	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap		0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.2	9,345,000,00	0
Koreksi Lain-Lain	E.3.3	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	163,882,593,234,00	137,326,946,984,00
Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	87,800,939,484,00	96,214,359,293,00
Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	179,408,136,00	31,371,608,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung		0	0
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.3	77,052,042,600,00	0
Transfer Masuk		105,584,000,00	0
Transfer Keluar		886,564,714,00	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		9,345,000,00	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(1,378,914,574,00)	40,255,952,609,00
EKUITAS AKHIR	E.6	41,266,306,340,00	42,645,220,914,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
 18. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0517/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452).
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452).
 21. Surat Plh. Kepala KPPN Tanjungpinang Nomor S-610/KPN.0501/2025 Tanggal 23 April 2025 Hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Tahun 2024 (Audited).
 22. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686239/2024.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rencana Strategis Bawaslu

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 89 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Visi Bawaslu

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”.

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata **tepercaya**, adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepri Semester II Tahun 2024 ini merupakan laporan kementerian yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Kepri. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepri per 30 Desember Tahun 2024 ini merupakan laporan tingkat Kementerian Negara/Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Modul GLP dan Pelaporan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Bawaslu mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Berdasarkan klasifikasi ekonomi, maka belanja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
- c. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- d. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Negara (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh Bendahara Umum Negara (SPHL/SP3HL).
- e. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- f. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Belanja disajikan dalam LRA dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepri. Kas adalah uang tunai dan saldo

simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 2) Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 6) Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis-jenis piutang dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk putusan pengadilan yang menyatakan bahwa uang pengganti perkara tindak pidana korupsi harus disetorkan selain ke kas negara (kas daerah/BUMN/BUMD) maka tagihan uang pengganti tersebut tidak disajikan pada pos aset lancar di neraca, tetapi diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- 3) Untuk barang-barang yang memenuhi kriteria aset tetap walaupun dibeli dari MAK yang bukan peruntukannya, maka barang-barang tersebut tetap dibukukan sesuai dengan substansinya (substance over form).
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 5) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 4) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 5) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 6) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas, dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Bawaslu Provinsi Kepri telah mengadakan 12 (Enam) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan lembaga terkait pelaksanaan tahapan pengawasan pemilihan umum tahun 2024. Rincian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar DIPA Awal dan DIPA Revisi Tahun 2024

Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Pagu Sebelum Revisi	Pagu Setelah Revisi	Alasan Revisi
0 (Awal)	24-Nov-23	121.973.299.000	121.973.299.000	-
1	01-Feb-24	-	121.973.299.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
2	19-Feb-24	-	121.973.299.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
3	20-Mei-24	-	121.973.299.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
4	03-Jun-24	-	121.973.299.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
5	01-Jul-24	-	121.973.299.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
6	30-Jul-24	121.973.299.000	121.973.299.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
7	13-Ags-24	121.973.299.000	220.075.919.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
8	28-Okt-2024	220.075.919.000	218.381.408.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
9	12-Nov-2024	218.381.408.000	218.413.781.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
10	28-Nov-2024	218.413.781.000	218.413.781.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA
12	04-Des-2024	218.413.781.000	225.010.126.000	Pemutakhiran POK dan Hal III DIPA

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 179,408,136,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepri adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2024

Uraian	2024		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	179,408,136,00	-
Total		179,408,136,00	-

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 179,408,136,00, merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bawaslu Provinsi Kepri yang diperoleh dari:

1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Rp 179,408,136,00, sebesar 96 persen berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp 172,452,823,00. Adapun rincian atas Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3
Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

No	Nama Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Provinsi Kepri	32,365,292.00
2	Bawaslu Tanjungpinang	7,807,218.00
3	Bawaslu Bintan	0,00
4	Bawaslu Batam	78,743,732.00
5	Bawaslu Karimun	28,022,000.00
6	Bawaslu Lingga	0,00
7	Bawaslu Natuna	0,00
8	Bawaslu Anambas	25,414,581.00
Total		Rp 172,452,823,00

2. Penerimaan lelang dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.520.000,00.
3. Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp 435.313,00.

Selanjutnya realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023 terdapat peningkatan sebesar 14,90% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
Pendapatan	179,408,136,00	26,743,058,00	14,90
Total	179,408,136,00	26,743,058,00	14,90

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 169,710,954,620,00 atau 54 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 216,075,411,000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	10,608,017,000,00	9,957,411,449,00	93.86
Belanja Barang (RM)	200,917,788,000,00	155,410,678,742,00	77.35
Belanja Modal	4,549,606,000,00	4,343,088,000,00	95.46
Total Belanja Kotor	216,075,411,000,00	173,088,407,938,00	78.54
Pengembalian Belanja	0	3,377,453,318,00	-
Total Belanja Bersih	216,075,411,000,00	169,710,954,620,00	78.54

Realisasi belanja berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Realisasi Belanja Berdasarkan Program

Program	2024		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi (RM)	90,105,043,000,00	62,923,037,387,00	73.58
Program Dukungan Manajemen (RM)	27,650,970,000,00	24,877,902,097,00	89.97
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (HLD)	98,319,398,000,00	81,910,015,136,00	83.31
Total	216,075,411,000,00	169,710,954,620,00	80.11

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 41 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penambahan Belanja Pegawai karena adanya penambahan ASN berupa Gaji dan Tunjangan PPPK
2. Adanya Pembayaran THR dan Gaji 13 ASN dan PPNPN.

3. Realisasi Belanja Barang lebih tinggi dikarenakan pada tahun 2024 Anggaran Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 sudah di gunakan pada bulan Desember 2024.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
Belanja Pegawai	9,957,411,449,00	6,889,447,090,00	44.53
Belanja Barang	158,787,908,489,00	91,273,083,522,00	73.97
Belanja Modal	4,343,088,000,00	104,300,000,00	58.36
Total Belanja Kotor	173,088,407,938,00	98,266,830,612,00	76.14
Pengembalian	3,377,453,318,00	2,052,471,319,00	64.56
Jumlah	169,710,954,620,00	96,214,359,293,00	76.39

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp 173,088,407,938,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp 173,088,407,938,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp 3,377,453,318,00.

Pengembalian belanja sebesar Rp 3,377,453,318,00 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang berasal dari Belanja Pegawai yaitu Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar RRp 1,571,00, Belanja Uang Makan PNS Rp 222,000,00, Belanja Bahan Rp 462.326.941,00, Belanja Honor Ouput Kegiatan Rp17.592.800,00, Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp 49.324.408,00, Belanja Sewa Rp 38.140.800,00, Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 117,150,685,00, Belanja Jasa Profesi Rp99.900.000,00, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp1.553.900.945,00, Belanja Paket Meeting Dalam Kota Rp885.684.500,00, dan Belanja Paket Meeting Luar Kota Rp 153,208,668,00.

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepri sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 9,957,187,878,00 atau 93.86 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp 10,608,017,000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,727,778,000,00	1,381,224,861,00	79.93
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4,644,306,000,00	4,644,301,154,00	100
Belanja Lembur	173,337,000,00	134,750,000,00	77.74
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1,435,417,000,00	1,310,151,333,00	91.27
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	2,627,179,000,00	2,486,984,101,00	60
Jumlah Belanja Kotor	10,608,017,000,00	9,957,411,449,00	93.86
Pengembalian Belanja Pegawai	0	(223,571)	0
Total	10,608,017,000,00	9,957,187,878,00	93.86

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 9,957,187,878,00 dan Rp 6,886,018,279,00 terjadi kenaikan sebesar 44.6 persen.

1. Adanya pegawai ASN baru yang menyebabkan penambahan jumlah Aparatur Sipil Negara;
2. Adanya Pembayaran gaji ke-13 PNS Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kab/Kota;
3. Adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pejabat Struktural Eselon II, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepri;

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,381,224,861,00	1,266,442,005,00	9.06
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4,644,301,154,00	4,396,662,150,00	5.63
Belanja Lembur	134,750,000,00	15,721,740,00	757.09
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1,310,151,333,00	76,535,000,00	1611.83
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	2,486,984,101,00	1,134,086,195,00	119.29
Jumlah Belanja Kotor	9,957,411,449,00	6,889,447,090,00	44.53
Pengembalian Belanja Pegawai	(223,571)	(3,428,811,00)	(106.52)
Total	9,957,187,878,00	6,886,018,279,00	44.60

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp 9,957,187,878,00 seluruhnya berasal dari APBN yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji PNS serta uang makan PNS bulan Januari s.d. Desember 2024;

2. Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja PPPK bulan Januari s.d. Desember 2024;
3. Pembayaran Tunjangan struktural bulan Januari s.d. Desember 2024;
4. Pembayaran Tunjangan Fungsional PNS bulan Januari s.d. Desember 2024;
5. Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur di Bawaslu Provinsi untuk bulan Januari s.d. Desember 2024;
6. Belanja Uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota bulan Januari s.d. Desember 2024;
7. Belanja Tunjangan kinerja PNS Bawaslu bulan Januari s.d. Desember 2024;
8. Belanja THR dan Gaji ke-13 PNS dan PPPK Tahun 2024;
9. Pembayaran THR dan Gaji ke-13 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp 9,957,187,878,00 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Pegawai Bruto sebesar Rp 9,957,411,449,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp 223,571,00. Adapun rician pengembalian belanja sebagai berikut:

Tabel 10
Pengembalian Belanja Pegawai per 31 Desember 2024

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,571,00
2	511129	Belanja Uang Makan PNS	222,000,00
Total			223,571,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Badan Pengawas Pemilu sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 155,410,678,742,00 atau 77.35 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp 200,917,788,000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 tersaji sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	8,641,389,000,00	7,581,634,910,00	87.74
Belanja Barang Non Operasional	54,173,362,000,00	44,989,461,496,00	82.07
Belanja Persediaan	20.537.000,00	20.536.000,00	100
Belanja Jasa	25,574,381,000,00	21,412,101,590,00	83.19
Belanja Pemeliharaan	1,816,517,000,00	1,396,832,047,00	76.9
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	110,691,602,000,00	83,387,342,446,00	72.88
Jumlah Belanja Kotor	200,917,788,000,00	158,787,908,489,00	77
Pengembalian Belanja		3,377,229,747,00	-
Total	200,917,788,000,00	155,410,678,742,00	77.35

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 155,410,678,742,00 dan Rp 89,224,041,014,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 74 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 disebabkan oleh :

Adanya Belanja Proritas Nasional (PN) yaitu Pemilu dan Pemilihan;

Tabel 12
Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	7,581,634,910,00	9.264.285.524,00	(18)
Belanja Barang Non Operasional	44,989,461,496,00	30.508.903.343,00	47
Belanja Persediaan	20.536.000,00	20.536.000,00	-
Belanja Jasa	21,412,101,590,00	16.178.660.599,00	32
Belanja Pemeliharaan	1,396,832,047,00	1.209.821.173,00	15
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	83,387,342,446,00	34.090.876.883,00	145
Jumlah Belanja Kotor	158,787,908,489,00	91.273.083.522,00	74
Pengembalian Belanja	3,377,229,747,00	2.049.042.508,00	(65)
Total	155,410,678,742,00	89.224.041.014,00	74

B.4.1 Belanja Barang (Rupiah Murni/RM)

Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 73,500,663,606.00 dan Rp 89.224.041.014,00 Realisasi Belanja Barang (RM) per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 18 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena Tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 sudah dimulai pada bulan Desember 2024.

Tabel 13
Perbandingan Belanja Barang (RM) Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
Belanja Barang Operasional	7,148,995,907.00	9.264.285.524,00	(23)
Belanja Barang Non Operasional	18,843,377,061.00	30.508.903.343,00	(38)
Belanja Persediaan	20,536,000.00	20.536.000,00	-
Belanja Jasa	9,732,741,903.00	16.178.660.599,00	(40)
Belanja Pemeliharaan	1,332,332,047.00	1.209.821.173,00	10
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	39,820,446,435.00	34.090.876.883,00	17
Jumlah Belanja Kotor	76,898,429,353.00	91.273.083.522,00	(16)
Pengembalian Belanja	3,377,229,747.00	2.049.042.508,00	65
Total	73,500,663,606.00	89.224.041.014,00	(18)

Realisasi belanja barang (RM) sebesar Rp 73,500,663,606.00 yang dipergunakan untuk:

1. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
2. Pengawasan Pemilu Partisipatif Provinsi dan Kab/kota;
3. Fasilitasi. Koordinasi. dan Pelaporan Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
4. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Bawaslu Provinsi;
5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
6. Pembinaan dan Pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
7. Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
8. Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
9. Pengelolaan Kehumasan. Peliputan dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
10. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
11. Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
12. Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Provinsi dan Kab/kota;
13. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Provinsi dan Kab/kota.

B.4.2 Belanja Barang (Hibah)

Realisasi Belanja Barang (Hibah) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 81,910,015,136,00 dan 0. Hal ini disebabkan karena adanya Tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai. Adapun rincian atas belanja barang (Hibah) adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Realisasi Belanja Barang (Hibah) Per 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi
	2024 (Rp)
Belanja Keperluan Perkantoran	323,307,003.00
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	109,332,000.00
Belanja Bahan	4,490,855,182.00
Belanja Honor Output Kegiatan	18,987,416,000.00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,667,813,253.00
Belanja Langganan Listrik	126,303,371.00
Belanja Langganan Telepon	14,377,610.00
Belanja Langganan Air	47,027,164.00
Belanja Jasa Konsultan	0.00
Belanja Sewa	6,403,396,293.00
Belanja Jasa Profesi	1,169,000,000.00
Belanja Jasa Lainnya	3,939,791,249.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64,500,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,339,211,696.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,927,711,500.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11,818,377,092.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,481,595,723.00
Belanja Keperluan Perkantoran	323,307,003.00
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	109,332,000.00
Belanja Bahan	4,490,855,182.00
Belanja Honor Output Kegiatan	18,987,416,000.00
Jumlah Belanja Kotor	81,910,015,136.00
Pengembalian Belanja	0
Total	81,910,015,136.00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4,343,088,000,00 atau 95 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 4,549,606,000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024

Uraian	2024		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,549,606,000,00	4,343,088,000,00	95
Jumlah Belanja Kotor	4,549,606,000,00	4,343,088,000,00	95
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total	4,549,606,000,00	4,343,088,000,00	95

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 4,343,088,000,00 dan Rp 104,300,000,00. Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 4.064 persen dibandingkan realisasi per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh terjadi pembelian beberapa barang milik negara yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,343,088,000	104,300,000	4.064
Jumlah Belanja Kotor	4,343,088,000	104,300,000	4.064
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total	4,343,088,000	104,300,000	4.064

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 4,343,088,000,00 dan Rp 104,300,000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 mengalami Peningkatan sebesar 4.064 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,343,088,000	104,300,000	4.064
Jumlah Belanja Kotor	4,343,088,000	104,300,000	4.064

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
Pengembalian	-	-	-
Total	4,343,088,000	104,300,000	4.064

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 4,343,088,000,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk pembelian :

Tabel 18
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Kendaraan Dinas Jabatan/ Alat Angkutan	6	3,610,800,000,00
2	CCTV-Camera Control Television Control	1	15.000.000,00
3	Alat Penghancur Kertas	1	13.000.000,00
4	Mesin Absensi	2	16.200.000,00
5	LCD/Projector Infocus	3	25.950.000,00
6	Sofa	1	11.500.000,00
7	Lemari Es	7	20.285.000,00
8	A.C. Split	3	28.125.000,00
9	Tripod Camera	3	6.600.000,00
10	Camera Digital	4	44.960.000,00
11	Video Conference	1	57.950.000,00
12	LCD Monitor	1	1.200.000,00
13	Kamera Stile	1	11.700.000,00
14	Kursi Dorong	1	1.443.000,00
15	P.C. Unit	2	37.450.000,00
16	Lap Top	25	372.675.000,00
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	41.300.000,00
18	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	25.000.000,00
19	External/Portable Hardisk	1	1.950.000,00
	JUMLAH		4,343,088,000,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas Dibendahara Pengeluaran

Saldo Kas dibendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00. Kas dibendahara Pengeluaran merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp300.000.000,00 terdiri dari Uang Persediaan (UP) di Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 19
Rincian Sumber Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran UP

No	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah UP (Rp)
1	Provinsi Kepulauan Riau	81.000.000,00
2	Kota Tanjungpinang	31.000.000,00
3	Kabupaten Bintan	31.000.000,00
4	Kota Batam	31.000.000,00
5	Kabupaten Karimun	31.000.000,00
6	Kabupaten Lingga	31.000.000,00
7	Kabupaten Natuna	31.000.000,00
8	Kabupaten Anambas	31.000.000,00
Total		300.000.000,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 35,403,788,152,00 dan Rp41.086.816.400,00. Kas tersebut bersumber dari Dana Hibah Pilkada Tahun 2024 dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Tabel 20
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah (Rp)
1	Kas Lainnya di KL dari Hibah	35,399,880,820,00
2	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3,907,332,00
Total		35,403,788,152,00

Tabel 21
Rincian Kas Lainnya di KL dari Hibah

No	Uraian	Kas Lainnya di BP (Rp)
1	Bawaslu Kabupaten Lingga	626,333,716,00
2	Bawaslu Kabupaten Natuna	1,129,530,876,00
3	Bawaslu Kabupaten Bintan	709,068,912,00

No	Uraian	Kas Lainnya di BP (Rp)
4	Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	24,597,491,142,00
5	Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas	3,440,094,612,00
6	Bawaslu Kabupaten Karimun	1,824,806,952,00
7	Bawaslu Kota Batam	3,072,554,610,00
8	Bawaslu Kota Tanjungpinang	0,00
JUMLAH		35,399,880,820,00

Tabel 22
Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	Kas Lainnya di BP (Rp)
1	Transaksi Refund Tiket Bawaslu Batam	3,907,332,00
JUMLAH		3,907,332,00

C.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja dibayar di muka adalah pembayaran yang dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) berupa Beban Sewa yang periode sewanya berakhir s.d. 2025 sebesar Rp 1,279,625,433,00 dan dijabarkan dalam table berikut:

Tabel 23
Rincian Belanja Barang yang dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2024

No	Bawaslu	Uraian Sewa	Nominal
1	Provinsi Kepri	Sewa Kendaraan Operasional dan Gakkumdu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau	213,841,500.00
2		Pekerjaan Sewa Kendaraan Operasional dan Gakkumdu Bawaslu Anambas Tahun 2024	15,000,000.00
3		Sewa Rumah Dinas	3,358,333.33
4		Sewa gudang arsip	183,150,000.00
5		Sewa Perlengkapan Pendukung Gudang Arsip	459,883,600.00
6	Bawaslu Batam	Belanja Sewa Gedung Kantor Gakkumdu Kota Batam	10,000,000.00
7		Belanja Sewa Peralatan Kantor Gakkumdu Kota Batam	6,700,000.00
8		Belanja Sewa Meubelair Kantor Gakkumdu Kota Batam	7,800,000.00
9		Belanja Sewa Gedung Kantor Panwaslu Kecamatan Batam Kota	10,000,000.00
10		Belanja Sewa Peralatan Panwaslu Kecamatan Batam Kota	7,984,000.00
11		Belanja Sewa Meubelair Panwaslu Kecamatan Batam Kota	11,276,000.00
12		Belanja Sewa Gedung Kantor Panwaslu Kecamatan Lubuk Baja	10,000,000.00
13		Belanja Sewa Peralatan Kantor Panwaslu Kecamatan Lubuk Baja	7,984,000.00
14		Belanja Sewa Meubelair Panwaslu Kecamatan Lubuk Baja	11,566,000.00

No	Bawaslu	Uraian Sewa	Nominal
15		Belanja Sewa Gedung Kantor Panwaslu Kecamatan Batu Ampar	10,000,000.00
16		Belanja Sewa Peralatan Panwaslu Kecamatan Batu Ampar	7,984,000.00
17		Belanja Sewa Meubelair Kantor Panwaslu Kecamatan Batu Ampar	11,566,000.00
18		Belanja Sewa Gedung Kantor Panwaslu Kecamatan Bengkong	10,000,000.00
19		Belanja Sewa Peralatan Panwaslu Kecamatan Bengkong	8,000,000.00
20		Belanja Sewa Meubelair Kantor Panwaslu Kecamatan Bengkong	11,600,000.00
21		Belanja Sewa Gedung Kantor Panwaslu Kecamatan Nongsa	10,000,000.00
22		Belanja Sewa Peralatan Kantor Panwaslu Kecamatan Nongsa	8,000,000.00
23		Belanja Sewa Meubelair Panwaslu Kecamatan Nongsa	11,600,000.00
24		Belanja Sewa Gedung Kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Beduk	9,600,000.00
25		Belanja Sewa Peralatan Kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Beduk	8,000,000.00
26		Belanja Sewa Meubelair Kantor Panwaslu Kecamatan Sungai Beduk	11,600,000.00
27		Belanja Sewa Gedung Kantor Panwaslu Kecamatan Galang	10,000,000.00
28		Belanja Sewa Peralatan Kantor Panwaslu Kecamatan Galang	7,984,000.00
29		Belanja Sewa Meubelair Panwaslu Kecamatan Galang	11,566,000.00
30		Belanja Sewa Peralatan Kantor Panwaslu Kecamatan Bulang	10,000,000.00
31		Belanja Sewa Meubelair Panwaslu Kecamatan Bulang	7,984,000.00
32		Belanja Sewa Gedung Kantor Panwaslu Kecamatan Sagulung	11,566,000.00
33		Belanja Sewa Peralatan Kantor Panwaslu Kecamatan Sagulung	10,000,000.00
34		Belanja Sewa Meubelair Panwaslu Kecamatan Sagulung	7,984,000.00
35		Belanja Sewa Gedung Kantor Panwaslu Kecamatan Batu Aji	11,276,000.00
36		Belanja Sewa Peralatan Kantor Panwaslu Kecamatan Batu Aji	10,000,000.00
37		Belanja Sewa Meubelair Panwaslu Kecamatan Batu Aji	7,984,000.00
38		Belanja Sewa Gedung Kantor Panwaslu Kecamatan Sekupang	11,566,000.00
39		Belanja Sewa Kantor Panwaslu Kecamatan Sekupang	10,000,000.00
40		Belanja Sewa Meubelair Panwaslu Kecamatan Sekupang	8,000,000.00
41		Belanja Sewa Gedung Kantor Panwaslu Kecamatan Belakang Padang	11,600,000.00
42		Belanja Sewa Peralatan Kantor Panwaslu Kecamatan Belakang Padang	10,000,000.00
43		Belanja Sewa Meubelair Panwaslu Kecamatan Belakang Padang	7,966,000.00
44		Belanja Sewa Peralatan Kantor Gakkumdu Kota Batam	11,556,000.00

No	Bawaslu	Uraian Sewa	Nominal
45		Belanja Sewa Meubelair Gakkumdu Kota Batam	21,300,000.00
Total			1,279,625,433,00

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp22.642.899,00 dan Rp0,00.

Tabel 24
Perbandingan Rincian Tanah TA 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
Tanah	22.642.899,00	0,00
Total	22.642.899,00	0,00

Aset tetap berupa Tanah merupakan transfer masuk dari Bawaslu RI pada Tahun 2024.

C.5 Peralatan Dan Mesin

Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 13,977,141,173,00 (intrakomptabel) dan Rp10.180.236.287,00. Adapun saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 25
Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Portable Generating Set	1	34.999.800,00
2	Pompa Air	1	2.450.000,00
3	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	10	3.381.150.000,00
4	Sepeda Motor	2	38.397.000,00
5	Mesin Penghitung Uang	1	3.812.998,00
6	Mesin Fotocopy Double Folio	1	55.750.000,00
7	Lemari Besi/Metal	57	215.888.520,00
8	Lemari Kayu	101	296.351.000,00
9	Filing Cabinet Besi	17	54.239.880,00
10	Filing Cabinet Kayu	2	9.700.000,00
11	Brankas	7	32.157.800,00
12	Lemari Katalog	7	20.170.000,00
13	Tabung Pemadam Api	21	32.526.000,00
14	CCTV	9	111.136.400,00
15	Alat Penghancur Kertas	17	82.382.500,00
16	Mesin Absensi	8	63.433.000,00

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
17	LCD Projector/Infocus	13	99.547.401,00
18	Alat Perekam Suara(Voice Pen)	1	1.081.001,00
19	Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	13.143.297,00
20	Alat Sidik Jari	1	7.240.000,00
21	Meja Kerja Kayu	255	775.469.970,00
22	Kursi Besi/Metal	268	462.866.000,00
23	Sice	42	253.601.000,00
24	Meja Rapat	17	164.739.400,00
25	Meja Resepsionis	9	44.820.000,00
26	Cubikal	2	140.128.535,00
27	Mesin Penghisap Debu	9	28.493.801,00
28	Alat Pembersih Lainnya	1	560.000,00
29	Lemari Es	9	19.750.000,00
30	A.C Split	121	640.238.386,00
31	Rak Piring Alumunium	2	6.700.000,00
32	Televisi	9	55.206.000,00
33	Sound System	13	102.424.001,00
34	Mic Conference	11	53.795.400,00
35	Camera Video	3	47.505.000,00
36	Dispenser	1	2.100.000,00
37	Lambang Instansi	1	39.000.000,00
38	Handy Cam	5	43.140.000,00
39	Tangki Air	1	4.160.000,00
40	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1.000.000,00
41	Audio Amplifier	1	5.900.000,00
42	Microphone/Wireless MIC	17	84.688.708,00
43	Microphone/Boom Stand	6	10.900.000,00
44	Microphone Cable	4	4.084.000,00
45	Voice Recorder	8	9.500.000,00
46	Mixer Sound Sistem	1	2.700.000,00
47	Lensa Kamera	1	7.800.000,00
48	Camera Digital	18	156.100.001,00
49	Lampu Blitz Kamera	8	20.093.000,00
50	Mesin Barcode	1	3.500.000,00
51	Faximile	1	900.000,00
52	Unit Transceiver VHF Stationary	1	4.887.999,00
53	Alat Komunikasi Radio VHF Lainnya	2	6.536.008,00
54	Unit Antena Transceiver VHF Stationary	1	2.762.999,00
55	Clinical Thermometer	8	21.955.000,00
56	P.C Unit	112	972.345.142,00
57	Lap Top	72	702.328.067,00
58	Note Book	14	143.583.500,00
59	Tablet PC	9	40.894.000,00
60	Printer	96	241.049.991,00
61	Scanner	28	228.858.582,00

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
62	External/Portable Hardisk	34	43.555.200,00
63	Video Conference	1	33.000.000,00
64	Camera Conference	7	8.610.000,00
65	Sofa	1	11.500.000,00
66	Firewall	1	34.500.000,00
JUMLAH		1.557	10.243.786.287,00

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	10.180.236.287,00
-----------------------------------	-----------	--------------------------

Mutasi tambah:

-Pembelian	4,343,088,000,00
-Transfer Masuk	105,584,000,00
-Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	9,415,000,00

Mutasi Kurang:

-Transfer Keluar	(661,112,114,00)
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(70,000,00)

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	13,977,141,173,00
-----------------------------------	-----------	--------------------------

Akumulasi

Penyusutan per 31 Desember 2024	Rp	9,525,507,799,00
---------------------------------	----	------------------

Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	4,451,633,374,00
--	-----------	-------------------------

Penjelasan mutasi tambah yaitu :

- a. Pengadaan sebesar Rp 4,343,088,000,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk pembelian :

Tabel 26
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Kendaraan Dinas Jabatan/ Alat Angkutan	6	3,610,800,000,00
2	CCTV-Camera Control Television Control	1	15.000.000,00
3	Alat Penghancur Kertas	1	13.000.000,00
4	Mesin Absensi	2	16.200.000,00
5	LCD/Projector Infocus	3	25.950.000,00
6	Sofa	1	11.500.000,00
7	Lemari Es	7	20.285.000,00
8	A.C. Split	3	28.125.000,00
9	Tripod Camera	3	6.600.000,00
10	Camera Digital	4	44.960.000,00
11	Video Conference	1	57.950.000,00

12	LCD Monitor	1	1.200.000,00
13	Kamera Stile	1	11.700.000,00
14	Kursi Dorong	1	1.443.000,00
15	P.C. Unit	2	37.450.000,00
16	Lap Top	25	372.675.000,00
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	41.300.000,00
18	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	25.000.000,00
19	External/Portable Hardisk	1	1.950.000,00
	JUMLAH		4,343,088,000,00

b. Transfer Masuk sebesar Rp 105,584,000,00 terdiri dari :

Tabel 27
Rincian Transfer Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Head Set	2	10.767.000,00
2	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	6	12.654.000,00
3	Note Book	2	68.154.000,00
4	Tablet PC	1	14.009.000,00
	JUMLAH		105,584,000,00

Penjelasan mutasi keluar yaitu:

c. Transfer Keluar sebesar Rp 661,112,114,00 terdiri dari:

Tabel 28
Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	KUANTITAS	JUMLAH
1	Lemari Besi/Metal	10	39.081.000,00
2	Brandkas	1	4.580.000,00
3	Lemari Katalog	6	15.000.000,00
4	Tabung Pemadam Api	6	11.865.000,00
5	CCTV-Camera Control Television System	1	5.945.000,00
6	Alat Penghancur Kertas	2	10.452.500,00
7	Mesin Absensi	2	14.800.000,00
8	LCD Projector/Infocus	1	5.240.001,00
9	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	634.000,00
10	Meja Kerja Kayu	34	77.846.000,00
11	Kursi Besi/Metal	63	70.039.000,00
12	Sice	4	23.840.000,00
13	Meja Rapat	1	23.300.000,00
14	Meja Resepsionis	1	4.970.000,00
15	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.260.001,00
16	Lemari Es	1	2.500.000,00
17	A.C Split	11	54.612.502,00
18	Sound Sistem	2	11.963.001,00
19	Mic Conference	2	18.200.000,00
20	Camera Video	1	15.805.000,00
21	P.C Unit	11	95.938.800,00
22	Lap Top	10	104.692.000,00
23	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	25.101.200,00

24	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	27.029.200,00
25	External/Portable Hardisk	4	4.299.200,00
26	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	2.676.000,00
27	Microphone/Wireless Mic	2	9.943.708,00
28	Microphone/Boom Stand	2	2.400.000,00
29	Microphone Cable	1	1.000.000,00
30	Voice Recorder	2	1.900.000,00
31	Camera Digital	1	5.468.001,00
32	Camera Conference	1	1.230.000,00
	JUMLAH		661,112,114,00

d. Koreksi Pencatatan Nilai sebesar Rp 9,345,000,00 terdiri dari:

Tabel 29
Rincian Koreksi Pencatatan Nilai

NO	PERALATAN DAN MESIN	KOREKSI PENCATATAN	JUMLAH
1	Alat Komunikasi	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	8,070,000,00
2	Telephone Lainnya	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(60,000,00)
3	Tablet PC	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1,345,000,00
4		Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(10,000,00)
	JUMLAH		9,345,000,00

C.6 Gedung Dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan Desember 2023 adalah Rp161.218.481,00 dan Rp161.218.481,00 yang merupakan pagar semi permanen. sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 30
Rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

No.	Lokasi	Luas/Unit	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Dompok Bukit Bestari Tanjungpinang	4.995 M ²	161.218.481,00	Tugu Tanda Batas/Pagar
	Jumlah		161.218.481,00	

Mutasi atas Gedung dan Bangunan pada tahun pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi atas Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp 161.218.481,00
---	--------------------------

Mutasi tambah:**Mutasi kurang:**

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 161.218.481,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	Rp 14,509,665,00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 146,708,816,00

C.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 9,540,017,464,00 dan Rp 9,060,689,481,00.

Tabel 31
Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	9,525,507,799,00	1,240,417,070,00
2	Gedung dan Bangunan	14,509,665,00	3,224,370,00
3	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	2,039,280,00
Total		9,540,017,464,00	1,245,680,720,00

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 :

Tabel 32
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	10,180,236,287,00	9,525,507,799,00	654,728,488,00
2	Gedung dan Bangunan	161.218.481,00	14,509,665,00	146,708,816,00
Total		10.405.004.768,00	9,540,017,464,00	801,437,304,00

C.8 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp77.200.000,00 dan Rp77.200.000,00. Aset Tak Berwujud

merupakan Software berupa Website Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
Adapun rekap ATB per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

Tabel 33
Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024

No	Uraian	Kuantitas	Jumlah (Rp)
1	Software Komputer	1	77.200.000,00
Total		1	77.200.000,00
Akumulasi Amortisasi			77.200.000,00
Jumlah			0,00

Tabel 34
Rincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00
Jumlah		77.200.000,00	77.200.000,00	0,00

C.9 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp77.200.000,00 dan Rp77.200.000,00. Rincian akumulasi penyusutan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 35
Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Aset Lainnya	2024 (Rp)	2023 (Rp)
A	Aset Tak Berwujud		
1	Software Komputer	77.200.000,00	77.200.000,00
Jumlah		77.200.000,00	77.200.000,00
B	Aset Lain-Lain		
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00
Total		77.200.000,00	77.200.000,00

Tabel 36
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi/ Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00
Jumlah		77.200.000,00	77.200.000,00	0,00
B	Aset Lain-Lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00
Total		77.200.000,00	77.200.000,00	0,00

C.10 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 adalah Rp 38,092,334,00. Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Tabel 37
Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Naik/ Turun %
1	Belanja Barang YMHD	19,269,317,00	158,884,672,00	(78)
2	Belanja Pegawai YMHD	18,823,017,00	-	-
Total		38,092,334,00	158,884,672,00	(73)

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 senilai **Rp 38,092,334,00**. Utang kepada Pihak Ketiga berupa Belanja Barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 senilai Rp 19,269,317,00 merupakan pembayaran atas tunggakan belanja hibah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri atas:

Tabel 38
Rincian Belanja Barang yang masih harus dibayar per tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Jenis Belanja	Nominal
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52	1,530,000,00
2	Belanja Keperluan Perkantoran	52	5,084,317,00
3	Belanja Honor Output Kegiatan	52	12,655,000,00
Total			19,269,317,00

Utang kepada Pihak Ketiga Belanja Pegawai yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 senilai Rp 18,823,017,00 merupakan SPM kekurangan gaji yang diajukan pada Tahun 2025 dikarenakan adanya Kenaikan Pangkat Angkatan II, Angkatan IV, dan Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Belanja Pegawai yang masih harus dibayar per tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	Jenis Belanja	Nominal
1	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	51	15,549,000,00
2	Beban Gaji Pokok PNS	51	3,024,600,00

No	Uraian	Jenis Belanja	Nominal
3	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51	468,00
4	Belanja Tunj. PPh PNS	51	28,357,00
5	Belanja Tunj. Anak PNS	51	26,032,00
6	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	51	194,560,00
Total			18,823,017,00

C.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya dalam akuntansi pemerintah adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi tidak termasuk dalam kategori utang tertentu lainnya. Saldo utang jangka pendek lainnya periode audited adalah sebesar Rp 2,712,500,00 merupakan Pajak baru dilakukan pungutan pada periode 14 dan baru disetor pada periode 14, namun tidak muncul pada periode 13. Telah dilakukan pembayaran dan penyetoran pajak tersebut pada periode 14 sehingga saldo Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebesar Rp 0,00. Adapun rincian atas utang jangka pendek lainnya tersebut adalah:

Tabel 40
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Uraian	Nominal
1	Pembayaran Paket Meeting Fullday Bimtek PTPS seKecamatan Batam Kota Bawaslu Batam	1,738,500,00
2	Pembayan belanja pengadaan buku alat kerja pengawasan di PT. KHAIRUMI SYIFA MUDAJAYA Bawaslu Batam	974,000,00
JUMLAH		2,712,500,00

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 41,266,306,340,00 dan Rp 42,645,220,914,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset senilai Rp 41,304,398,674,00 dan kewajiban senilai Rp 38,092,334,00. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D. 1 Pendapatan Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp435.313,00 dan Rp0,00.

Tabel 41
Rincian Pendapatan Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2024

No	NTPN	Uraian	Nominal (Rp)
1	1099C61QV3UAU02O	Jasa Giro RDP Bintan	1.389,00
2	81C8D61QV3UH9500	Jasa Giro RDP Batam	319.906,00
3	C054F7QLUP32M5UI	Jasa Giro RDP Batam	110.336,00
4	3C2567QLUPC6FR56	Jasa Giro Bawaslu Provinsi	3.682,00
Total			435.313,00

D. 2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 9,976,010,895,00 dan Rp 6,885,595,519,00 mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan tahun 2023 dikarenakan :

1. Adanya pembayaran atas Tunjangan Fungsional dan Tunjangan Kinerja bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum, Pengelola PBJ, dan Pranata Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Gaji dan THR Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada ASN pada periode April dan Juni 2024;
3. Adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pejabat Struktural, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepri yang dibayarkan pada periode April dan Juni 2024;
4. Adanya Penambahan PPPK Tahun 2024 sebanyak 37 Orang.

Tabel 42
Perbandingan Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1,381,001,290,00	1,264,923,134,00	9.2
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	4,644,301,154,00	4,396,662,150,00	5.6
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1,310,151,333,00	15,721,740,00	8.233
Beban Uang Lembur	134,750,000,00	76,535,000,00	(76.1)
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	2,502,533,101,00	1,131,753,495,00	119.7
Total	9,976,010,895,00	6,885,595,519,00	44

Mutasi Beban Pegawai dapat dirincikan pada mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	0
Mutasi Tambah:		
- Belanja Pegawai (LRA)	Rp	9,957,187,878,00
- Belanja Pegawai YMHD	Rp	18,823,017,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	9,976,010,895,00
Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024	Rp	9,976,010,895,00

Mutasi tambah berasal dari saldo Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Pegawai 2024 Yang Masih Harus Dibayar. Adapun rincian Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebagai berikut.

Tabel 43
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Uraian	Akun	Nominal	Keterangan
Belanja Gaji Pokok PNS	511111	3,024,600,00	SK Kenaikan Pangkat Angkatan II dan IV TMT Desember 2024 diterima di tahun 2025
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	511121	194,560,00	SK Kenaikan Pangkat Angkatan II dan IV TMT Desember 2024 diterima di tahun 2025
Belanja Tunj. Anak PNS	511122	26,032,00	SK Kenaikan Pangkat Angkatan II dan IV TMT Desember 2024 diterima di tahun 2025
Belanja Tunj. PPh PNS	511125	28,357,00	SK Kenaikan Pangkat Angkatan II dan IV TMT Desember 2024 diterima di tahun 2025

Belanja Pembulatan Gaji PNS	511119	468,00	SK Kenaikan Pangkat Angkatan II dan IV TMT Desember 2024 diterima di tahun 2025
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	512411	15,549,000,00	Tunkin a.n. Sulaiman Pegawai Mutasi dari Pemerintah Daerah
Total		18,823,017,00	

D. 3 Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 205,215,000,00 dan Rp 20,536,000,00.

Tabel 44
Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	205,215,000,00	20,536,000,00	(100%)

Per 31 Desember 2024 Beban Persediaan mengalami peningkatan sebesar 899 persen dibandingkan per 31 Desember 2023 dikarenakan pada tahun 2024 meningkatnya penggunaan ATK pada masa tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

Terdapat selisih antara Beban Persediaan dan LRA sebesar Rp184.679.000 merupakan saldo jurnal penanda identitas PTPS tahun 2023.

Beban persediaan per 31 Desember 2024 merupakan beban yang diperoleh dari hasil mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	184.679.000,00
Mutasi Tambah:		
- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp	20,536,000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	0,00
Mutasi Kurang:		
Saldo per 31 Desember 2024:	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2024	Rp	205,215,000,00

D. 4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 72,255,044,259,00 dan Rp 54,752,671,847,00.

Tabel 45
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	6,730,405,867,00	8,635,421,176,00	(22)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50.600,00	1,083,800,00	(100)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	354,176,000,00	429,296,000,00	(17)
Beban Barang Operasional Lainnya	494,190,400,00	187,054,000,00	164
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	0	0,00	(100,00)
Beban Bahan	7,848,158,657,00	5,131,216,182,00	53
Beban Honor Output Kegiatan	33,246,940,200,00	23,301,120,000,00	42.68
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,377,773,490,00	542,658,186,00	522
Beban Langganan Listrik	466,275,798,00	508,171,281,00	(8)
Beban Langganan Telepon	19,509,835,00	35,339,843,00	(45)
Beban Langganan Air	68,902,314,00	77,310,779,00	(11)
Beban Sewa	14,061,010,649,00	13,666,575,200,00	2,89
Beban Jasa Profesi	1,686,000,000,00	1,004,500,000,00	16.28
Beban Jasa Lainnya	3,939,791,249,00	468,622,400,00	740.72
Total	72,255,044,259,00	53,988,368,847,00	33.83

Terjadi kenaikan beban barang dan jasa sebesar 36 persen per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Kenaikan Beban Barang dan Jasa disebabkan karena:

1. Bertambahnya beban Honor Output Kegiatan karena Tahapan Pemilu dan Pilkada sudah mulai berjalan pada tahun 2024
2. Bertambahnya beban belanja sewa, beban langganan daya dan jasa karena baru terbentuknya Panwaslu Kecamatan Ad-Hoc pada Tahun 2024
3. Bertambahnya beban operasional perkantoran karena adanya Panwaslu Kecamatan Ad-Hoc pada Tahun 2024.

Terdapat selisih beban Barang dan Jasa antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional sebesar Rp 3,940,680,00 merupakan Utang kepada pihak ketiga lainnya.

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	0
Mutasi Tambah (LRA):		
- Belanja Keperluan Perkantoran	Rp	6,733,217,910,00
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	Rp	50.600,00
- Belanja Honor Operasional Satker	Rp	354,176,000,00
- Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp	494,190,400,00
- Belanja Bahan	Rp	7,848,158,657,00
- Belanja Honor Output Kegiatan	Rp	33,234,285,200,00
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	Rp	3,377,773,490,00
- Belanja Langganan Listrik	Rp	485,575,610,00
- Belanja Langganan Telepon	Rp	19,509,835,00
- Belanja Langganan Air	Rp	69,890,814,00
- Belanja Sewa	Rp	15,073,293,282,00
- Belanja Jasa Profesi	Rp	1,686,000,000,00
- Belanja Jasa Lainnya	Rp	3,939,791,249,00
- Belanja Barang YMHD	Rp	17,739,317,00
- Jurnal Balik Sewa DDM 2023	Rp	229,202,000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	73,562,854,364,00
Mutasi Kurang:		
- Belanja Sewa Dibayar Dimuka	Rp	1,279,625,433,00
- Jurnal balik Belanja Operasional TAYL	Rp	28,184,672,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(1,307,810,105,00)
Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024	Rp	72,255,044,259,00

D. 5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1,396,832,047,00 dan Rp1,209,821,173,00.

Tidak ada perbedaan antara realisasi belanja pemeliharaan pada LRA dan beban pemeliharaan pada LO.

Tabel 46
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan	1,396,832,047,00	1,209,821,173,00	15.45%

Terjadi kenaikan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 sebesar 15.45 persen dibandingkan pada 31 Desember 2023 hal ini dikarenakan kebutuhan untuk perawatan dan pergantian sparepart kendaraan dinas yang kondisinya sudah usang dan rusak, dan juga ada penambahan kendaraan sewa Gakkumdu untuk provinsi dan kabupaten/kota. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan pada LRA.

D. 6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 80,544,320,316,00 dan Rp 33,007,705,444,00.

Tabel 47
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	10,896,742,450,00	4,650,897,384,00	134
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,876,199,035,00	10,913,229,620,00	73
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,402,375,176,00	7,883,947,220,00	197
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27,369,003,655,00	9,559,631,220,00	97
Total	80,544,320,316,00	33,007,705,444,00	144

Dimulainya tahapan Pemilu Serentak 2024 sejak tahun lalu hingga saat ini dapat menyebabkan meningkatnya belanja perjalanan dinas sebesar 144 persen pada 31 Desember 2024 dibandingkan pada 31 Desember 2023.

Terdapat selisih beban Perjalanan Dinas antara Laporan Realisasi Anggaran Rp80,677,397,648,00 dengan Laporan Operasional sebesar Rp

80,548,227,648,00 dengan selisih sebesar Rp 132,230,000,00. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 merupakan beban yang diperoleh dari hasil Mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	0,00
Mutasi Tambah:		
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp	80,677,397,648,00
- Belanja Barang 2024 Yang Masih Harus Dibayar	Rp	1,530,000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	80,678,927,648,00
Mutasi Kurang:		
- Jurnal Balik Tunggakan Paket Meeting Tahun 2023	Rp	130,700,000,00
- Jurnal Balik Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya 2024		3,907,332,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	134,607,332,00
Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024	Rp	80,544,320,316,00

Mutasi tambah berupa Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 80,677,397,648,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48
Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024

Akun	Uraian	Nominal
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,896,742,450,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	27,369,003,655,00
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	23,402,375,176,00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	18,876,199,035,00
524111	Tunggakan 2024 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,530,000,00
Total		80,678,927,648,00

Mutasi Kurang merupakan Tunggakan yang masih harus dibayar TAYL sebesar Rp130.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 49
Beban yang masih harus dibayar TAYL per 31 Desember 2024

Akun	Uraian	Jenis Belanja	Nominal
521811	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	52	130.700.000,00

Akun	Uraian	Jenis Belanja	Nominal
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	52	3,907,332,00
Total			134,607,332,00

D. 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1,072,838,427,00 dan Rp 1,245,680,720,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 13.9 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2023.

Tabel 50
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,224,370,00	3,224,370,00	0
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,069,614,057,00	1,240,417,070,00	(13.84)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	0,00	2.039.280,00	(100)
Total	1,072,838,427,00	1,245,680,720,00	(13.95)

D. 8 Kegiatan Non Operasional

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.520.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 51
Perbandingan Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6.520.000,00	0,00	(100)
Total	6.520.000,00	0,00	(100)

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 172,452,823,00 dan Rp26.743.058,00. Sehingga Surplus Kegiatan Non Operasional per 20 Juni 2024 sebesar Rp165.572.823,00.

Tabel 52
Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	172,452,823,00	26,742,894,00	545
Total	172,452,823,00	26,742,894,00	545

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL per 31 Desember 2024 sebesar Rp 172,452,823,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 26,742,894,00 diperoleh dari Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL.

1. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 172,452,823,00 yang terdiri atas:

Tabel 53
Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

No	Nama Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
1	Kelebihan pembayaran belanja sewa meubelair Panwascam Belakang Padang TA 2023	18,000,000
2	Kelebihan pembayaran belanja sewa meubelair Panwascam Belakang Padang TA 2023	10,466,400
3	Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas belanja sewa peralatan dan sewa meublair panwascam Kabupaten Karimun TA 2023.	20,000,000
4	Pengembalian Belanja atas Temuan BPK Belanja Paket Meeting Luar Kota Tahun 2023 Bawaslu Batam	45,600
5	Pengembalian Temuan BPK Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	100,000
6	Kelebihan pembayaran belanja sewa meubelair pada panwaslucam bukit bertarung bawaslu kota tanjungpinang	3,069,550
7	Kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan pada panwaslucam bukit bestari bawaslu kota tanjungpinang	1,211,668
8	Pengembalian realisasi belanja perjalanan dinas yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada bawaslu kota tanjungpinang an. Muhammad Yusuf	130,000
9	Pengembalian realisasi belanja perjalanan dinas yang belum didukung bukti pertanggungjawaban pada bawaslu kota tanjungpinang an. Norima sitompul	356,000
10	Pengembalian pembayaran biaya perjalanan dinas rangkap pada Bawaslu Kota Tanjungpinang an. Norima dan Dahwan	500,000
11	Pengembalian pembayaran biaya perjalanan dinas rangkap pada Bawaslu Kota Tanjungpinang an. Said Muhammad R dan Dahwan	500,000
12	Pengembalian pembayaran biaya perjalanan dinas rangkap pada Bawaslu Kota Tanjungpinang an. Hendri Saputra dan Said Muhammad R	420,000

No	Nama Satuan Kerja	Jumlah (Rp)
13	Kelebihan Pembayaran Belanja sewa peralatan dan sewa meubelair pada panwascam sagulung bawaslu kota batam TA 2023	9,226,750
14	Pembayaran Denda keterlambatan penyampaian barang berupa Penanda Identitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-Provinsi Kepulauan Riau TA 2023	25,648,702
15	Kelebihan pembayaran belanja sewa peralatan dan sewa meubelair pada gakkumdu bawaslu kota batam TA 2023	9,003,200
16	Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Sewa Meubelair pada Gakkumdu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau TA 2023	6,716,590
17	Pengembalian Belanja Perjalan An Dinas Bawaslu Karimun Tahun 2023	8,022,000
18	Pengembalian Belanja Paket Meeting Dalam Kota Bawaslu Batam Tahun 2023	190,000
19	Pengembalian Belanja Keperluan Kantor Bawaslu Batam Tahun 2023	1,396,000
20	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran Bawaslu Batam Tahun 2023	962,308
21	Pengembalian Belanja Bahan Bawaslu Batam Tahun 2023	300,000
22	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Bawaslu Batam Tahun 2023	3,318,474
23	Pengembalian Belanja Perjalana Dinas Dalam Kota Bawaslu Batam Tahun 2023	12,435,000
24	Pengembalian Belanja Paket Meeting Luar Kota Anambas 2023	19,818,384
25	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa Anambas 2023	2,470,197
26	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Anambas 2023	3,126,000
27	Pengembalian Sisa Ls Spd Bawaslu Tpi Tahun 2023	1,620,000
28	Kelebihan pembayaran belanja sewa meubelair Panwascam Belakang Padang TA 2023	13,400,000
Total		172,452,823,00

D. 9 Surplus/Defisit LO

Defisit LO untuk per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp 165,270,852,808,00) dan (Rp97,070,994,375,00).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 42,645,220,914,00 dan Rp 2,389,268,305,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah defisit sebesar (Rp 165,270,852,808,00) dan (Rp 97,070,994,375,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai Koreksi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp 9,345,000,00 dan 2023 adalah Rp0,00. Adapun Koreksi tersebut berasal dari penambahan dan pengurangan koreksi atas asset non revaluasi yang telah dijelaskan pada Neraca bagian aset.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 163,882,593,234,00 dan Rp 137,326,946,984,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 54
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	87,800,939,484,00	96,214,359,293,00
Diterima dari Entitas Lain	(179,408,136,00)	(31,371,608,00)
Pengesahan Hibah Langsung	77,042,042,600,00	41,086,816,400,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung TAYL	0,00	0,00

Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0,00	0,00
Transfer Keluar	(886,564,714,00)	0,00
Transfer Masuk	105,584,000,00	57,142,899,00
Jumlah	163,882,593,234,00	137,326,946,984,00

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp 179,408,136,00 merupakan pendapatan PNBPN tahun 2024, terdiri dari:

Tabel 55
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas lain	Jumlah (Rp)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	172,452,823,00
Penjualan Peralatan dan Mesin	6,520,000,00
Pendapatan Jasa Giro	435,313,00
Total	179,408,136,00

Sedangkan DKEL sebesar Rp 87,800,939,484,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari :

Tabel 56
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Ditagihkan ke Entitas lain	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	9,957,187,878,00
Belanja Barang	73,500,663,606,00
Belanja Modal	4,343,088,000,00
Jumlah	87,800,939,484,00

2. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Dalam Negeri

Sepanjang tahun 2024 terdapat pengesahan hibah langsung dalam negeri sebesar Rp 77,042,042,600,00 yang terdiri atas:

- Penerimaan Hibah Bawaslu Lingga Tahap II 3,690,000,000
- Penerimaan Hibah Bawaslu Natuna Tahap II 4,500,000,000

- Penerimaan Hibah Bawaslu Tanjungpinang Tahap II
3,600,000,000
- Penerimaan Hibah Bawaslu Bintan Tahap II 2,881,600,000
- Penerimaan Hibah Bawaslu Provinsi Kepri Tahap II
34,476,624,600
- Penerimaan Hibah Bawaslu Anambas Tahap II
8,019,970,000
- Penerimaan Hibah Bawaslu Karimun Tahap II
10,993,848,000
- Penerimaan Hibah Bawaslu Batam Tahap II
8,880,000,000

E.5 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Penurunan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp 1,378,914,574,00) dan Kenaikan Ekuitas pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 40,255,952,609,00.

Tabel 57
Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(165,270,852,808,00)	(97,070,994,375,00)
Transaksi Antar Entitas	163,882,593,234,00	137,326,946,984,00
Kenaikan/Penurunan Aset Non Revaluasi	9,345,000,00	0,00
Jumlah	(1,378,914,574,00)	40,255,952,609,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 41,266,306,340,00 dan Rp 42,645,220,914,00.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp 42,645,220,914,00 ditambah penurunan ekuitas sebesar (Rp 1,378,914,574,00)

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.

Berikut dibawah Struktur Organisasi di Bawaslu terbaru berdasarkan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,:

A. Sekretariat Bawaslu Provinsi

Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri atas:

- 1) Kepala Sekretariat : **Yessi Yuniuss, S.E., M.Si.**
- 2) Kepala Bagian Administrasi : **Siska Ernida Wati, S.Si.**
- 3) Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat :
Ridwan, S.H.
- 4) Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum : **Takwin Saleh, S.H.**
- 5) Bendahara Pengeluaran : **Cyntia Wulandari, A.Md.**
- 6) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Dameria Siahaan, A.Md.Ak.**

B. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

a. Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang terdiri atas:

- 1) Koordinator Sekretariat : **Sulaiman, Sos**

- 2) Kasubbag Administrasi : **Khairul,SE**
 - 3) Bendahara Pengeluaran Pembantu Hibah : **Cynthia Wulandari, A.Md.**
- b. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan terdiri atas:
- 1) Plt. Koordinator Sekretariat : **Sulistiawan**
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Pramesti Putri**
- c. Sekretariat Bawaslu Kota Batam terdiri atas:
- 1) Kepala Sekretariat : **Susanti, S.T**
 - 2) Kasubbag Administrasi : **Rofi Fardial, SH**
 - 3) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Novelysa Samosir, S.Si**
- d. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun terdiri atas:
- 1) Koordinator Sekretariat : **Azim, S.Pd.I**
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Sutarman Edi**
- e. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga terdiri atas:
- 1) Koordinator Sekretariat : **Darol Kadmi**
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Surrahman**
- e. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas:
- 1) Koordinator Sekretariat : **Lindawati, A.Md.**
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Cynthia Wulandari, A.Md**
- f. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna terdiri atas:
- 1) Koordinator Sekretariat : **Fisabillillah**
 - 2) Bendahara Pengeluaran Pembantu : **Hanapi**

Sebagaimana disusunnya SOTK baru ini sudah mulai dilakukannya pengangkatan Jabatan Struktural Kepala Sekretariat di beberapa Kabupaten Kota seperti Tanjungpinang dan Batam, sedangkan pengisian jabatan fungsional lainnya dilakukan sejak Tahun 2020 sampai dengan 2024 dilengkapi dengan adanya fungsional dari PPPK.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Bawaslu sedang

melaksanakan pemetaan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas untuk dapat disetarakan sebagai Jabatan Fungsional.

Tabel 58
Jabatan Fungsional PNS di Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri pada Tahun 2024

No.	Nama Pegawai	Jabatan Fungsional	Tahun Pelantikan
1	Wahyu Nur Laili, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	2021
2	Cynthia Wulandari, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	2021
3	Grace Usniarta Sihombing	Pengelola PBJ Ahli Pertama	2022
4	Dameria Siahaan, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	2022
5	Vivi Susanti, S.E.	Pengelola PBJ Ahli Pertama	2022

Tabel 59
Jabatan Fungsional PPPK di Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri pada Tahun 2024

No.	Nama Pegawai	Jabatan Fungsional	Tahun Pelantikan
1	Sarah Adharaisa	Pranata Humas Ahli Pertama	2023
2	Alwendi Saputra	Analisis Hukum Ahli Pertama	2024
3	Ferry Irawan	Analisis Hukum Ahli Pertama	2024
4	Surya Feriansyah	Analisis Hukum Ahli Pertama	2024
5	Mariah Fitriana	Analisis Hukum Ahli Pertama	2024
6	Tika Mustiaty	Analisis Hukum Ahli Pertama	2024
7	Shandra Puspita Sari	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2024
8	Sakinah	Arsiparis Ahli Pertama	2024
9	Muhammad Afhendo Hermawan	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
10	Bambang Eka Rufiantino	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
11	Handa Yanna	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
12	Eva Fitri Meiyana	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
13	Mardiansyah Saputra	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
14	Wira Amru Hasbuddin	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
15	Hamidah	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
16	Royali Kander Zebua	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
17	Jumadil Hakim	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
18	Said Dailani	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
19	Simson Sigiro	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
20	Sahrian Winardi	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
21	Muhammad Afzalurrahman	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
22	Suhaimi Putra	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
23	Yulinawati	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
24	Chandra Sujaya	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024

		Umum Ahli Pertama	
25	Budiyanto Ulfa	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
27	Thariq Barakat	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
28	Elza Safitri	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
29	Said Muhammad Raessa	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
30	Mirnasari	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
31	Fenny Ariadna Ayu	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
32	Dede Nugraha	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	2024
33	Mutiara Sellyna, SE	Perencana Ahli Pertama	2023
34	Mukhlis, SE	Perencana Ahli Pertama	2023
35	Mayasari, S.Sos	Pranata Humas	2023
36	Nadar Afriadi	Pranata Humas	2023
37	Risma Wahyuni	Perencana Ahli Pertama	2023

F.2 Pengungkapan Lain-Lain

1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepri sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebanyak 8 rekening, yang terdiri dari.

- Rekening Virtual Pengeluaran sejumlah 4 rekening, yang terdiri atas Rekening BPG, Rekening RDP, Rekening PDHL PILGUB dan Rekening PDH PILGUB.
- Rekening Virtual Pengeluaran Pembantu sejumlah 28 rekening, masing-masing Kabupaten/Kota memiliki 4 rekening yang terdiri atas Rekening BPG, Rekening PDHL PILBUP, Rekening PDH PILGUB, dan Rekening PDH PILBUP/PILWAKO.

2. Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor: 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran

pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 60
Pejabat Perbendaharaan

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1	Yessi Yunius, SE, M.Si.	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Ridwan, S.H.	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Dwi Suharani Raja Guk Guk	Pejabat Penandatangan SPM
4	Cynthia Wulandari, A.Md.	Bendahara Pengeluaran
5	Siska Ernida Wati, S.Si.	Pejabat Pembuat Komitmen Hibah
6	Dameria Siahaan, A.Md.Ak.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Hibah

Berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nomor: 024/KU.01.00/KR/01/2023 Tanggal 28 Januari 2023 Tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 61
Pejabat Perbendaharaan

No.	Nama	Jabatan
1	Sulaiman, Sos	Kuasa Pengguna Anggaran Kota TanjungPinang
	Dwi Suharani Raja Guk Guk	Pejabat Penandatangan SPM
	Khairul, SE	Pejabat Pembuat Komitmen Kota TanjungPinang
	Cynthia Wulandari,	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kota TanjungPinang
2	Sulistiawan	Pejabat Pembuat Komitmen Kab.Bintan
	Pramesti Putri	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab.Bintan
3	Susanti, ST	Pejabat Pembuat Komitmen Kota Batam
	Novelysa Samosir	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kota Batam
4	Azim, S.Pd.I.	Pejabat Pembuat Komitmen Kab.Karimun
	Sutarman Edi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab.Karimun
5	Darol Kadmi	Pejabat Pembuat Komitmen Kab.Lingga
	Surrahman	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab.Lingga
6	Lindawati, A.Md.	Pejabat Pembuat Komitmen Kab.Kep.Anambas
	Cynthia Wulandari, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab.Kep.Anambas
7	Fisabillillah, S.Pd.I.	Pejabat Pembuat Komitmen Kab.Natuna
	Hanapi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab.Natuna

F.3 Anggaran Prioritas Nasional

Dalam mempersiapkan Bawaslu untuk menghadapi tahapan pemilu 2024, terdapat anggaran Prioritas Nasional yang telah dibuka sejak dimulainya tahapan Pemilu yaitu, untuk Pagu Anggaran kegiatan Perencanaan, Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Pagu Anggaran Kegiatan

Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dan Pagu Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu oleh Lembaga Ad-Hoc. Adapun rincian belanja Anggaran Prioritas Nasional pada Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 62
Rincian Belanja Anggaran Pemilu

No	Kegiatan	Jumlah
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 25,262,232,705,00
2	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi 5245 dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp 355,073,595,00
3	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan 6661 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp 25,172,994,431,00
4	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	Rp 20,848,958,404
5	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	Rp 5,719,179,666,00
9	Pengawasan Masa Tenang	Rp 1,191,424,720,00
11	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 6,400,076,032,00
13	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	Rp 363,231,459,00
17	Pengawasan Logistik	Rp 3,283,680,180,00
Total		Rp 88,596,851,192,00

F.4 HIBAH

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu. Adapun rinciannya dijabarkan dalam tabel tersebut dibawah.

Tabel 63
Daftar Rekening Pemerintah Lainnya yang Dikelola Bendahara

No.	Bawaslu	Nama Rekening	Nomor Rekening
1	Provinsi Kepri	BPG 009 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPRI	652496862391000
2	Provinsi Kepri	RPL009 PDHL PIGUB KPR 28LBYC4A	654256862392401

3	Provinsi Kepri	RPL009 PDH PILGUB KPR 28LBYC4A	654266862392515
4	Bawaslu Tanjungpinang	RPL009 PDH PIGUB TJPN 28LBYC4A	654266862392501
5	Bawaslu Tanjungpinang	RPL009 PDH PIKOT TJP 2JA6JMHA	654266862392508
6	Bawaslu Tanjungpinang	RPL009 PDHL PIKOT TJP 2JA6JMHA	654256862392402
7	Bawaslu Tanjungpinang	BPP 009 PANWAS KOTA TANJUNGPINANG	652296862391001
8	Bawaslu Bintan	BPP 009 PANWAS KAB BINTAN	652296862391002
9	Bawaslu Bintan	RPL009 PDHL PIBUP BNT 2K637QLA	654256862392403
10	Bawaslu Bintan	RPL009 PDH PIBUP BNT 2K637QLA	654266862392509
11	Bawaslu Bintan	RPL009 PDH PIGUB BINT 28LBYC4A	654276862392502
12	Bawaslu Batam	RPL009 PDH PIGUB BATM 28LBYC4A	654266862392503
13	Bawaslu Batam	RPL009 PDH PIKOT BTM 22TBL Y9A	654276862392510
14	Bawaslu Batam	RPL009 PDHL PIKOT BTM 22TBL Y9A	654256862392404
15	Bawaslu Batam	BPP 009 PANWAS KOTA BATAM	652296862391003
16	Bawaslu Karimun	BPP 009 PANWAS KAB TANJUNG BALAI KARIMUN	652296862391004
17	Bawaslu Karimun	RPL009 PDHL PIBUP KRM 2X6HHREA	654256862392405
18	Bawaslu Karimun	RPL009 PDH PIGUB KRMN 28LBYC4A	654266862392504
19	Bawaslu Karimun	RPL009 PDH PIBUP KRM 2X6HHREA	654266862392511
20	Bawaslu Lingga	RPL009 PDH PLBUP LNG 2QKWU9RA	654266862392512
21	Bawaslu Lingga	RPL009 PDH PIGUB LING 28LBYC4A	654266862392505
22	Bawaslu Lingga	RPL009 PDHL PLBUP LNG 2QKWU9RA	654256862392406
23	Bawaslu Lingga	BPP 009 PANWAS KAB LINGGA	652296862391005
24	Bawaslu Natuna	BPP 009 PANWAS KAB NATUNA	652296862391006
25	Bawaslu Natuna	RPL009 PDHL PIBUP NTN 22L9NAEA	654256862392407
26	Bawaslu Natuna	RPL009 PDH PIGUB NTUN 28LBYC4A	654266862392506
27	Bawaslu Natuna	RPL009 PDH PIBUP NTN 22L9NAEA	654266862392513
28	Bawaslu Anambas	RPL009 PDH PIBUP ANB 2ZJGFDZA	654266862392514
29	Bawaslu Anambas	RPL009 PDH PIGUB ANBS 28LBYC4A	654266862392507
30	Bawaslu Anambas	RPL009 PDHL PIBUP ANB 2ZJGFDZA	654256862392408
31	Bawaslu Anambas	BPP 009 PANWAS KAB NATUNA	652296862391006

Atas Penerimaan Dana hibah yang diterima oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dirincikan pada tabel tersebut dibawah.

Tabel 64
Daftar NPHD dan Register Hibah

No.	Bawaslu	NPHD	Nominal	No. Register
1	Kepri	02/NPHDPoldagri/XI/2023 dan Nomor 361/HM.02.00/K.KR/11/2023 Tanggal 01 November 2023.	57,461,041,000	28LBYC4A
2	Tanjungpinang	466.7/13/1.1.02/2023 dan Nomor 097/HM.00/KR-06/10/2023 Tanggal 16 Oktober 2023.	6,000,000,000	2JA6JMHA
3	Bintan	270/270/X/2023 dan Nomor 001/HK.002.00/K.KR-02/10/2023 Tanggal 27 Oktober 2023.	7,204,000,000	2K637QLA
4	Batam	900.1.9/02/XI/2023 dan Nomor 039/KU.00/K.KR-07/11/2023 Tanggal 09 November 2023.	14,800,000,000	22TBL Y9A
5	Karimun	P/200/BAKESBANGPOL/204/2023 dan 036/HM.02.00/K.KR-01/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023.	10,993,908,000.00	2X6HHREA
6	Lingga	17/NPHD/X/2023 dan Nomor 047/HM.02.00.K.KR-03/10/2023 Tanggal 02 Oktober 2023.	6,150,000,000	2QKWU9RA
7	Natuna	100.37/NPHDSet/X/2023/339 dan Nomor 096/HM.02.00/K.KR-04/10/2023 Tanggal 23 Oktober 2023.	7,500,000,000	22L9NAEA
8	Anambas	200.1.5.9/382/BAKESBANGPOL/NPHD/10/2023 dan 016/PR.30.00/KR-05/10/2023 tanggal 01 November 2023.	8,020,000,000	2ZJGFDZA
TOTAL			118,128,949,000	

Atas Nominal NPHD yang ada dijelaskan beberapa yang sudah diterima dan sudah disahkan pendapatannya. Adapun yang belum disahkan pendapatannya dikarenakan tidak terdapat kode COA pada aplikasi SAKTI. Syarat utama pengesahan pendapatan adalah mengesahkan belanja yang telah diinput. Apabila belanja tidak disahkan maka tidak dapat mengesahkan pendapatan. Namun, pengesahan belanja tidak dapat dilakukan karena COA pada SAKTI tidak ada. Untuk itu, berikut penjelasan atas penerimaan hibah yang ada.

Tabel 65

Daftar Pengesahan Pendapatan Hibah

No.	No Register Hibah	Penerimaan	Nominal	Status
1	28LBYC4A	24/11/2023	22,984,416,4000.00	SPHL
2	2JA6JMHA	1/12/2023	6,000,000,000.00	SPHL
3	2K637QLA	24/11/2023	7,204,000,000.00	SPHL
4	22TBLY9A	1/12/2023	14,800,000,000.00	SPHL
5	2X6HHREA	16/2/2024	6,596,314,800.00	SPHL
6	2QKWU9RA	23/10/2023	2,460,000,000.00	SPHL
7	22L9NAEA	17/11/2023	3,000,000,000.00	SPHL
8	2ZJGFDZA	3/1/2024	8,020,000,000	SPHL
TOTAL			118,128,949,000	

Tabel 66

Daftar Pengesahan Belanja Hibah

No.	No Register Hibah	Penerimaan Hibah 2024	SPHL Belanja 2024	Sisa Dana
1	28LBYC4A	3,690,000,000	5,523,666,284	626,333,716
2	2JA6JMHA	4,500,000,000	6,370,469,124	1,129,530,876
3	2K637QLA	3,600,000,000	5,181,036,956	818,963,044
4	22TBLY9A	2,881,600,000	6,494,931,088	709,068,912
5	2X6HHREA	34,476,624,600	32,863,549,858	24,597,491,142
6	2QKWU9RA	8,019,970,000	4,579,875,388	3,440,094,612
7	22L9NAEA	10,993,848,000	9,169,041,048	1,824,806,952
8	2ZJGFDZA	8,880,000,000	11,727,445,390	3,072,554,610

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU 686239

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 1:46 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	179,408,136	179,408,136	0	0	31,371,608	31,371,608	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	179,408,136	179,408,136	0	0	31,371,608	31,371,608	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	179,408,136	179,408,136	0	0	31,371,608	31,371,608	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	216,075,411,000	169,710,954,620	(46,364,456,380)	78.54	116,486,816,000	96,214,359,293	(20,272,456,707)	82.6
1. Belanja Pegawai	10,608,017,000	9,957,187,878	(650,829,122)	93.86	7,821,005,000	6,886,018,279	(934,986,721)	88.05
2. Belanja Barang	200,917,788,000	155,410,678,742	(45,507,109,258)	77.35	108,558,811,000	89,224,041,014	(19,334,769,986)	82.19
3. Belanja Modal	4,549,606,000	4,343,088,000	(206,518,000)	95.46	107,000,000	104,300,000	(2,700,000)	97.48
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU 686239

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 1:46 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	216,075,411,000	169,710,954,620	(46,364,456,380)	78.54	116,486,816,000	96,214,359,293	(20,272,456,707)	82.6
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Tanjungpinang, 6 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


YESSI YUNIUS, SE, M.Si
Pembina Utama Muda

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 1:46 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	35,403,788,152	41,086,816,400	(5,683,028,248)	(13.83)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,279,625,433	229,202,000	1,050,423,433	458.30
Persediaan	0	184,679,000	(184,679,000)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	36,683,413,585	41,500,697,400	(4,817,283,815)	(11.61)
ASET TETAP				
Tanah	22,642,899	22,642,899	0	0.00
Peralatan dan Mesin	13,977,141,173	10,180,236,287	3,796,904,886	37.30
Gedung dan Bangunan	161,218,481	161,218,481	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(9,540,017,464)	(9,060,689,481)	(479,327,983)	5.29
JUMLAH ASET TETAP	4,620,985,089	1,303,408,186	3,317,576,903	254.53
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	77,200,000	77,200,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(77,200,000)	(77,200,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	41,304,398,674	42,804,105,586	(1,499,706,912)	(3.50)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	38,092,334	158,884,672	(120,792,338)	(76.03)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38,092,334	158,884,672	(120,792,338)	(76.03)
JUMLAH KEWAJIBAN	38,092,334	158,884,672	(120,792,338)	(76.03)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	41,266,306,340	42,645,220,914	(1,378,914,574)	(3.23)
JUMLAH EKUITAS	41,266,306,340	42,645,220,914	(1,378,914,574)	(3.23)
JUMLAH EKUITAS	41,266,306,340	42,645,220,914	(1,378,914,574)	(3.23)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	41,304,398,674	42,804,105,586	(1,499,706,912)	(3.50)

Keterangan :

FINAL

Tanjungpinang, 6 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YESSI YUNIUS, SE, M.Si

Pembina Utama Muda 196803211997032003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 1:43 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	435,313	4,628,550	(4,193,237)	(90.595)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	435,313	4,628,550	(4,193,237)	(90.595)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	435,313	4,628,550	(4,193,237)	(90.595)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	9,976,010,895	6,885,595,519	3,090,415,376	44.882
Beban Persediaan	205,215,000	20,536,000	184,679,000	899.294
Beban Barang dan Jasa	72,255,044,259	54,752,671,847	17,502,372,412	31.966
Beban Pemeliharaan	1,396,832,047	1,209,821,173	187,010,874	15.458
Beban Perjalanan Dinas	80,544,320,316	33,007,705,444	47,536,614,872	144.017
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 1:43 PM

Halaman : 2

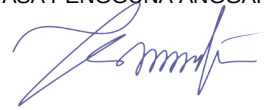
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,072,838,427	1,245,680,720	(172,842,293)	(13.875)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	165,450,260,944	97,122,010,703	68,328,250,241	70.353
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(165,449,825,631)	(97,117,382,153)	(68,332,443,478)	70.361
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	6,520,000	(13,253,280)	19,773,280	(149.195)
Pendapatan Pelepasan Aset	6,520,000	0	6,520,000	
Beban Pelepasan Aset	0	13,253,280	(13,253,280)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	172,452,823	59,641,058	112,811,765	189.151
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	172,452,823	59,641,058	112,811,765	189.151
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	178,972,823	46,387,778	132,585,045	285.819
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(165,270,852,808)	(97,070,994,375)	(68,199,858,433)	70.258
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(165,270,852,808)	(97,070,994,375)	(68,199,858,433)	70.258

Keterangan :

FINAL

Tanjungpinang, 6 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yessi Yuniuss', is positioned above the printed name.

YESSI YUNIUS, SE, M.Si
Pembina Utama Muda

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU

SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 06/05/25 12:25 AM

Tgl Cetak : 06/05/25 1:45 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	42,645,220,914	2,389,268,305	40,255,952,609	1,684.87
SURPLUS/DEFISIT-LO	(165,270,852,808)	(97,070,994,375)	(68,199,858,433)	70.26
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	9,345,000	0	9,345,000	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	9,345,000	0	9,345,000	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	163,882,593,234	137,326,946,984	26,555,646,250	19.34
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,378,914,574)	40,255,952,609	(41,634,867,183)	(103.43)
EKUITAS AKHIR	41,266,306,340	42,645,220,914	(1,378,914,574)	(3.23)

Keterangan :

FINAL

Tanjungpinang, 6 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YESSI YUNIUS, SE, M.Si
Pembina Utama Muda

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 1:46 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3,907,332	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	35,399,880,820	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	1,279,625,433	0
0.0	131111	Tanah	22,642,899	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	13,977,141,173	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	161,218,481	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,525,507,799
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	14,509,665
0.0	162151	Software	77,200,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	77,200,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	18,823,017
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	19,269,317
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	87,800,939,484
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	179,408,136	0
0.0	313211	Transfer Keluar	886,564,714	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	105,584,000
0.0	391111	Ekuitas	0	42,645,220,914
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	9,345,000
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	77,042,042,600
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,520,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	435,313
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	172,452,823
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	959,678,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15,472	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	58,547,980	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	13,708,398	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	108,710,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	30,458,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	6,268,877	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	52,794,180	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	118,574,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	35,520,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,644,301,154	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	981,881,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	15,633	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	71,277,920	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	17,651,400	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	65,440,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (3200) KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : (686239) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tgl Data : 06/05/25 2:29 AM
Tgl Cetak : 06/05/25 1:46 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	58,587,780	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	82,182,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	33,115,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	94,750,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	40,000,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,489,829,238	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,012,703,863	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	6,730,405,867	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	354,176,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	494,190,400	0
3.0	521211	Beban Bahan	7,848,158,657	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	33,246,940,200	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,377,773,490	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	466,275,798	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	19,509,835	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	68,902,314	0
3.0	522141	Beban Sewa	14,022,869,849	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,686,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,939,791,249	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,396,832,047	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10,896,742,450	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27,369,003,655	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23,402,375,176	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,876,199,035	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,069,614,057	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,224,370	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	205,215,000	0
JUMLAH			217,437,849,932	217,437,849,932

Keterangan :
FINAL

Tanjungpinang, 6 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YESSI YUNIUS, SE, M.Si
Pembina Utama Muda

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 3200

SATUAN KERJA : 686239

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tgl. Cetak 06/05/2025 1:46 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	41,086,816,400	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	229,202,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	184,679,000	0
0.0	131111	Tanah	22,642,899	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,180,236,287	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	161,218,481	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,049,404,186
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	11,285,295
0.0	162151	Software	77,200,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	77,200,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	158,884,672
0.0	391111	Ekuitas	0	42,645,220,914
JUMLAH			51,941,995,067	51,941,995,067

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 3200 **KEPULAUAN RIAU**
SATUAN KERJA : 686239 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/25 1:46 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/25 4:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	821,208,000	980,260,000	956,653,800	0	956,653,800	97.59	23,606,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	276,000	336,000	16,575	1,571	15,004	4.47	320,996
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	82,200,000	98,123,000	58,353,420	0	58,353,420	59.47	39,769,580
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	47,580,000	56,842,000	13,682,366	0	13,682,366	24.07	43,159,634
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	85,486,000	108,710,000	108,710,000	0	108,710,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	28,080,000	32,760,000	30,458,000	0	30,458,000	92.97	2,302,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	113,546,000	120,806,000	6,240,520	0	6,240,520	5.17	114,565,480
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	80,592,000	98,112,000	52,794,180	0	52,794,180	53.81	45,317,820
511129	Belanja Uang Makan PNS	310,680,000	187,429,000	118,796,000	222,000	118,574,000	63.26	68,855,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	28,120,000	44,400,000	35,520,000	0	35,520,000	80	8,880,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,597,768,000	1,727,778,000	1,381,224,861	223,571	1,381,001,290	79.93	346,776,710
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	4,526,856,000	4,644,306,000	4,644,301,154	0	4,644,301,154	100	4,846
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	4,526,856,000	4,644,306,000	4,644,301,154	0	4,644,301,154	100	4,846
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	41,531,000	992,677,000	981,881,600	0	981,881,600	98.91	10,795,400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14,000	308,000	15,633	0	15,633	5.08	292,367
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,158,000	91,476,000	71,277,920	0	71,277,920	77.92	20,198,080
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,492,000	54,824,000	17,651,400	0	17,651,400	32.2	37,172,600
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	71,820,000	65,440,000	0	65,440,000	91.12	6,380,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,088,000	89,936,000	58,587,780	0	58,587,780	65.14	31,348,220
511628	Belanja Uang Makan PPPK	46,620,000	83,871,000	82,182,000	0	82,182,000	97.99	1,689,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	18,130,000	50,505,000	33,115,000	0	33,115,000	65.57	17,390,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	124,593,000	1,435,417,000	1,310,151,333	0	1,310,151,333	91.27	125,265,667
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	135,892,000	133,337,000	94,750,000	0	94,750,000	71.06	38,587,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	26,481,000	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	162,373,000	173,337,000	134,750,000	0	134,750,000	77.74	38,587,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,408,859,000	1,581,991,000	1,474,280,238	0	1,474,280,238	93.19	107,710,762
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	122,934,000	1,045,188,000	1,012,703,863	0	1,012,703,863	96.89	32,484,137
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,531,793,000	2,627,179,000	2,486,984,101	0	2,486,984,101	94.66	140,194,899

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3200
SATUAN KERJA : 686239
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/25 1:46 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/25 4:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	7,943,383,000	10,608,017,000	9,957,411,449	223,571	9,957,187,878	93.86	650,829,122
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,698,699,000	7,593,235,000	6,733,217,910	0	6,733,217,910	88.67	860,017,090
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	23,400,000	19,668,000	50,600	0	50,600	0.26	19,617,400
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	249,516,000	455,212,000	354,176,000	0	354,176,000	77.8	101,036,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	393,146,000	573,274,000	494,190,400	0	494,190,400	86.2	79,083,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	10,364,761,000	8,641,389,000	7,581,634,910	0	7,581,634,910	87.74	1,059,754,090
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	10,634,542,000	10,873,684,000	8,310,485,598	462,326,941	7,848,158,657	72.18	3,025,525,343
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	16,327,918,000	38,737,974,000	33,251,878,000	17,592,800	33,234,285,200	85.79	5,503,688,800
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,937,700,000	4,561,704,000	3,427,097,898	49,324,408	3,377,773,490	74.05	1,183,930,510
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	28,900,160,000	54,173,362,000	44,989,461,496	529,244,149	44,460,217,347	82.07	9,713,144,653
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,537,000	20,537,000	20,536,000	0	20,536,000	100	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	20,537,000	20,537,000	20,536,000	0	20,536,000	100	1,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	422,448,000	631,449,000	485,575,610	0	485,575,610	76.9	145,873,390
522112	Belanja Langganan Telepon	8,400,000	28,028,000	19,509,835	0	19,509,835	69.61	8,518,165
522113	Belanja Langganan Air	37,800,000	88,883,000	69,890,814	0	69,890,814	78.63	18,992,186
522131	Belanja Jasa Konsultan	55,000,000	67,200,000	0	0	0	0	67,200,000
522141	Belanja Sewa	9,144,020,000	16,198,038,000	15,111,434,082	38,140,800	15,073,293,282	93.06	1,124,744,718
522151	Belanja Jasa Profesi	4,246,000,000	3,482,207,000	1,785,900,000	99,900,000	1,686,000,000	48.42	1,796,207,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	5,078,576,000	3,939,791,249	0	3,939,791,249	77.58	1,138,784,751
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	13,913,668,000	25,574,381,000	21,412,101,590	138,040,800	21,274,060,790	83.19	4,300,320,210
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,979,812,000	1,816,517,000	1,396,832,047	0	1,396,832,047	76.9	419,684,953
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,979,812,000	1,816,517,000	1,396,832,047	0	1,396,832,047	76.9	419,684,953
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,009,014,000	18,102,983,000	11,012,363,135	117,150,685	10,895,212,450	60.18	7,207,770,550
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,669,663,000	34,471,602,000	28,922,904,600	1,553,900,945	27,369,003,655	79.4	7,102,598,345
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12,830,152,000	26,455,648,000	24,288,059,676	885,684,500	23,402,375,176	88.46	3,053,272,824
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,321,149,000	31,661,369,000	19,164,015,035	153,208,668	19,010,806,367	60.04	12,650,562,633
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	58,829,978,000	110,691,602,000	83,387,342,446	2,709,944,798	80,677,397,648	72.88	30,014,204,352

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

JENIS SATUAN KERJA

: 115

: 01

: 3200

: 686239

: KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kode Lap : LRA.B.S.2

Tanggal : 06/05/25 1:46 PM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc

Tgl Data : 6/5/25 4:52 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	114,008,916,000	200,917,788,000	158,787,908,489	3,377,229,747	155,410,678,742	77.35	45,507,109,258
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,000,000	4,549,606,000	4,343,088,000	0	4,343,088,000	95.46	206,518,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	21,000,000	4,549,606,000	4,343,088,000	0	4,343,088,000	95.46	206,518,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	21,000,000	4,549,606,000	4,343,088,000	0	4,343,088,000	95.46	206,518,000
	JUMLAH BELANJA	121,973,299,000	216,075,411,000	173,088,407,938	3,377,453,318	169,710,954,620	78.54	46,364,456,380

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2024

Periode s.d bulan : 2024-14
Kementerian Negara/Lembaga : 115 - BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
Eselon 1 : 115.01 - SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Wilayah/Provinsi : 32.51 - KOTA BATAM/KEPULAUAN RIAU
Satuan Kerja : 686239 - SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 09-05-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	216,075,411,000.00	169,710,956,191.00	78.54%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	216,075,411,000.00	169,710,956,191.00	78.54%							
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	188,424,441,000.00	144,833,052,523.00	76.87%							
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	99,246,824,000.00	82,257,177,231.00	82.88%							
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	239,082,000.00	46,994,543.00	19.66%							
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	239,082,000.00	46,994,543.00	19.66%	14.0000	Layanan	14.0000	100%	80.34%		
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	250,000.00	0.00	0%							
001	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	250,000.00	0.00	0%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	100%		
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	98,319,398,000.00	81,910,015,136.00	83.31%							
002	Pengawasan Pilkada Serentak - Provinsi	46,586,205,000.00	32,863,549,858.00	70.54%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	29.46%		
003	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01	5,194,087,000.00	5,181,036,956.00	99.75%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	0.25%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
004	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 02	6,781,315,000.00	6,494,931,088.00	95.78%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	4.22%		
005	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 03	13,203,000,000.00	11,727,445,390.00	88.82%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	11.18%		
006	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 04	9,378,845,000.00	9,169,041,048.00	97.76%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	2.24%		
007	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 05	5,797,555,000.00	5,523,666,284.00	95.28%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	4.72%		
008	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 06	6,446,747,000.00	6,370,469,124.00	98.82%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	1.18%		
009	Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 07	4,931,644,000.00	4,579,875,388.00	92.87%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	7.13%		
BKC	Pemantauan lembaga	688,094,000.00	300,167,552.00	43.62%							
001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	688,094,000.00	300,167,552.00	43.62%	34.0000	Laporan	34.0000	100%	56.38%		
6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	43,245,762,000.00	24,769,324,831.00	57.28%							
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	42,832,762,000.00	24,364,149,831.00	56.88%							
001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	33,028,525,000.00	15,292,714,567.00	46.3%	70.0000	Lembaga	70.0000	100%	53.7%		
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	9,804,237,000.00	9,071,435,264.00	92.53%	6.0000	Laporan	6.0000	100%	7.47%		
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	413,000,000.00	405,175,000.00	98.11%							
001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	413,000,000.00	405,175,000.00	98.11%	26.0000	Sistem Informasi	26.0000	100%	1.89%		
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	22,625,033,000.00	20,848,958,404.00	92.15%							
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	22,625,033,000.00	20,848,958,404.00	92.15%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	13,198,624,000.00	13,126,839,200.00	99.46%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0.54%		
002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	9,426,409,000.00	7,722,119,204.00	81.92%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	18.08%		
6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	7,448,862,000.00	5,719,179,666.00	76.78%							
QCE	Penanganan Perkara	584,775,000.00	406,428,348.00	69.5%							
001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	584,775,000.00	406,428,348.00	69.5%	31.0000	Perkara	31.0000	100%	30.5%		
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	6,864,087,000.00	5,312,751,318.00	77.4%							
001	Pengawasan Masa Kampanye	6,864,087,000.00	5,312,751,318.00	77.4%	45.0000	Laporan	45.0000	100%	22.6%		
6844	Pengawasan Masa Tenang	2,133,767,000.00	1,191,424,720.00	55.84%							
QCE	Penanganan Perkara	356,291,000.00	209,225,260.00	58.72%							
001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	356,291,000.00	209,225,260.00	58.72%	32.0000	Perkara	32.0000	100%	41.28%		
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1,777,476,000.00	982,199,460.00	55.26%							
001	Pengawasan Masa Tenang	1,777,476,000.00	982,199,460.00	55.26%	45.0000	Laporan	45.0000	100%	44.74%		
6845	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	8,109,442,000.00	6,400,076,032.00	78.92%							
QCE	Penanganan Perkara	220,039,000.00	152,625,190.00	69.36%							
001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	220,039,000.00	152,625,190.00	69.36%	24.0000	Perkara	24.0000	100%	30.64%		
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7,889,403,000.00	6,247,450,842.00	79.19%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,889,403,000.00	6,247,450,842.00	79.19%	59.0000	Laporan	59.0000	100%	20.81%		
6846	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	958,859,000.00	363,231,459.00	37.88%							
QCE	Penanganan Perkara	145,420,000.00	31,497,900.00	21.66%							
001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	145,420,000.00	31,497,900.00	21.66%	16.0000	Perkara	16.0000	100%	78.34%		
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	813,439,000.00	331,733,559.00	40.78%							
001	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	813,439,000.00	331,733,559.00	40.78%	39.0000	Laporan	39.0000	100%	59.22%		
6847	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota	194,900,000.00	0.00	0%							
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	194,900,000.00	0.00	0%							
001	Publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	84,650,000.00	0.00	0%	8.0000	Laporan	8.0000	100%	100%		
002	Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	110,250,000.00	0.00	0%	8.0000	Laporan	8.0000	100%	100%		
6848	Pengawasan Logistik	4,460,992,000.00	3,283,680,180.00	73.61%							
QCE	Penanganan Perkara	70,452,000.00	39,613,245.00	56.23%							
001	Penanganan Pelanggaran Logistik	70,452,000.00	39,613,245.00	56.23%	16.0000	Perkara	16.0000	100%	43.77%		
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4,390,540,000.00	3,244,066,935.00	73.89%							
001	Pengawasan Logistik	4,390,540,000.00	3,244,066,935.00	73.89%	52.0000	Laporan	52.0000	100%	26.11%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
WA	Program Dukungan Manajemen	27,650,970,000.00	24,877,903,668.00	89.97%							
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	56,900,000.00	10,113,000.00	17.77%							
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	56,900,000.00	10,113,000.00	17.77%							
961	Layanan Reformasi Kinerja	56,900,000.00	10,113,000.00	17.77%	7.0000	Dokumen	7.0000	100%	82.23%		
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	295,135,000.00	59,970,000.00	20.32%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	295,135,000.00	59,970,000.00	20.32%							
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	63,760,000.00	9,000,000.00	14.12%	7.0000	Laporan	7.0000	100%	85.88%		
963	Layanan Data dan Informasi	231,375,000.00	50,970,000.00	22.03%	7.0000	Laporan	7.0000	100%	77.97%		
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	26,763,679,000.00	24,553,572,915.00	91.74%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	22,438,981,000.00	20,576,199,715.00	91.7%							
956	Layanan BMN	48,345,000.00	0.00	0%	7.0000	Layanan	7.0000	100%	100%		
994	Layanan Perkantoran	22,390,636,000.00	20,576,199,715.00	91.9%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	8.1%		
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,136,606,000.00	3,937,913,000.00	95.2%							
951	Layanan Sarana Internal	4,136,606,000.00	3,937,913,000.00	95.2%	44.0000	Unit	44.0000	100%	4.8%		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	188,092,000.00	39,460,200.00	20.98%							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	39,302,000.00	2,662,000.00	6.77%	7.0000	Dokumen	7.0000	100%	93.23%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	44,400,000.00	8,364,000.00	18.84%	7.0000	Dokumen	7.0000	100%	81.16%		
955	Layanan Manajemen Keuangan	48,820,000.00	12,450,000.00	25.5%	7.0000	Dokumen	7.0000	100%	74.5%		
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	55,570,000.00	15,984,200.00	28.76%	7.0000	Dokumen	7.0000	100%	71.24%		
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	535,256,000.00	254,247,753.00	47.5%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	409,996,000.00	170,379,153.00	41.56%							
957	Layanan Hukum	155,316,000.00	30,825,900.00	19.85%	15.0000	Laporan	15.0000	100%	80.15%		
962	Layanan Umum	193,030,000.00	131,582,600.00	68.17%	7.0000	Dokumen	7.0000	100%	31.83%		
969	Layanan Bantuan Hukum	61,650,000.00	7,970,653.00	12.93%	8.0000	Laporan	8.0000	100%	87.07%		
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	125,260,000.00	83,868,600.00	66.96%							
954	Layanan Manajemen SDM	125,260,000.00	83,868,600.00	66.96%	180.0000	Orang	180.0000	100%	33.04%		

UAKPA BAWASLU PROVINSI KEPRI